

JURNAL ILMIAH MANAJEMEN BISNIS DAN INOVASI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI (JMBI UNSRAT)

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Dimas Fajar Satrio, Kumba Digdowiseiso

Universitas Nasional

ARTICLE INFO

Keywords:

Fiscal Autonomy; Fiscal Dependency; South-East Sulawesi

Kata Kunci:

Kemandirian Fiskal; Ketergantungan Fiskal; Sulawesi Tenggara

Abstract. *This study tries to analyze the financial performance of regional governments after fiscal decentralization by analyzing the financial ratios in the regional budget realization reports for 17 districts / cities in Southeast Sulawesi for the 2015-2018 period. The measurement results show that the ratio of fiscal decentralization is still very low below 20%, financial dependence on the central government is also very high followed by ineffective PAD management. The findings indicate that in general the existence of fiscal decentralization does not encourage regional independence, especially in districts / cities in Southeast Sulawesi.*

Corresponding author:

Dimas Fajar Satrio

kumba.digdo@civitas.unas.ac.id

Abstrak. Kajian ini mencoba mengupas kinerja keuangan pemerintah daerah pasca desentralisasi fiskal dengan menganalisis rasio keuangan pada laporan realisasi APBD 17 Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara periode 2015-2018. Hasil pengukuran menunjukkan rasio desentralisasi fiskal masih sangat rendah di bawah 20%, ketergantungan keuangan pada pemerintah pusat juga sangat tinggi diikuti dengan pengelolaan PAD yang kurang efektif. Temuan mengindikasikan bahwa secara umum adanya desentralisasi fiskal tidak mendorong kemandirian daerah khususnya di kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.

PENDAHULUAN

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut melakukan tugasnya dengan baik dan transparan. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih baik, leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah itu sendiri. Adanya otonomi daerah tersebut pemerintah diberi keluluasaan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah itu sendiri. Adanya otonomi daerah tersebut pemerintah diberi keluluasaan untuk mengelola sumber daya dan mempertanggung jawabkan kepada masyarakat sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah diperlukan adanya sistem desentralisasi secara transparan, efektif dan efisien dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat luas.

Sebagaimana teori keagenan yang di dalamnya membahas tentang hubungan antara principal dan agent, rakyat sebagai principal memiliki hak untuk mendapatkan performa (kinerja) yang maksimal dari pemerintah daerah sebagai agent (Halim & Abdullah, 2006). Pengukuran kinerja kemudian dilakukan untuk menilai keberhasilan sebuah organisasi publik pada suatu periode tertentu, sehingga berikutnya dapat digunakan untuk mendorong peningkatan performa di masa depan, atau merancang upaya perbaikan seperlunya.

Pengukuran kinerja keuangan daerah bertujuan untuk menilai akuntabilitas maupun efektifitas pengelolaan anggaran sehubungan aktifitas pelayanan publik. Penilaian akuntabilitas tersebut, bukan hanya semata berbicara mengenai bagaimana pemerintah daerah mampu menyerap serta menggunakan anggaran, namun terlebih pada bagaimana pengalokasian anggaran tersebut telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai kaidah prinsip pengalokasian anggaran yang efektif, efisien serta ekonomis.

Kinerja keuangan daerah yang baik dapat dilihat dari efektivitas dalam menggali potensi daerah, ketergantungan kepada pemerintah pusat yang lebih rendah, dan porsi yang lebih besar dari PAD untuk membiayai pembangunan di daerah. Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani menyatakan secara rata-rata nasional saat ini PAD masih sangat terbatas, ketergantungan daerah terhadap transfer ke daerah masih sangat tinggi. Ketergantungan tersebut mencapai 80,1% dan kontribusi PAD hanya sekitar 12,87% (Olivia, 2018).

Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki sumberdaya alam yang melimpah serta beberapa objek wisata baik berupa maritime maupun budaya. Selain potensi wisata provinsi Sultra juga memiliki potensi PAD dari beberapa sector diantaranya hasil bumi, peternakan, dan perikanan. Dengan adanya sistem desentralisasi provinsi Sultra harus mampu mengelola seluruh aktivitas keuangan dengan seefektif mungkin serta harus dapat memberikan inovasi untuk pemerintahannya agar dapat lebih mandiri dalam mengelola serta meningkatkan kinerja keuangan daerahnya. Penelitian ini berupaya untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah kabupaten-kota di Sulawesi Tenggara.

LANDASAN TEORI

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Otonomi daerah menurut Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 (sebagaimana diubah dengan undang-undang 23 tahun 2014) adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan otonomi dimaksudkan agar dapat mendorong

pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Dengan pemberian otonomi kepada daerah, maka sistem yang dianut daerah adalah sistem desentralisasi.

Tujuan otonomi daerah menurut Undang-undang 33 tahun 2004 (sebagaimana diubah dengan undang-undang 23 tahun 2014) pada dasarnya adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Agar daerah otonom tersebut mampu mengelola rumah tangganya, maka daerah harus memiliki berbagai kemampuan antara lain keuangan, aparatur ekonomi dan lain sebagainya.

(Musgrave & Musgrave, 1989) menyatakan bahwa keberadaan sector public adalah menjalankan beberapa fungsi yang terkait dengan tiga permasalahan ekonomi, yaitu pencapaian distribusi yang merata, pemeliharaan stabilitas (pertumbuhan) ekonomi dan alokasi sumber daya yang efisien. Musgrave mendeteksi dua factor yang bisa dijadikan acuan untuk menentukan apakah secara ekonomi suatu fungsi itu akan lebih baik dilaksanakan terpusat ataukah didesentralisasikan.

Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 menjadi cikal bakal desentralisasi fiskal di Indonesia. Desentralisasi fiskal merupakan transfer sumber daya fiskal dan pengambilan kekuasaan ke tingkat daerah. (Fadli & Faisal, 2014) dalam (Digdowiseiso, 2016) menemukan bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan desentralisasi fiskal memiliki kemampuan untuk mengurangi disparitas daerah dikawasan timur dan barat Indonesia.

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah menimbulkan berbagai masalah yang diantaranya masalah pembagian kewenangan keuangan. Menurut Machfud Sidik (Aswarodi, 2001) perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang ideal adalah apabila setiap tingkatan pemerintah dapat independen dalam pengelolaan keuangannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Hal ini akan mendorong kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana subsidi dari pemerintah pusat.

Pengukuran Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas (Oentarto, 2004). Dalam penerapannya perlu pendefinisian yang jelas terkait misi, tujuan dan sasaran yang dapat diukur, dan berhubungan dengan hasil program. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan akan berhubungan dengan hasil atau *outcome* dari setiap program yang dilaksanakan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa melalui pengukuran kinerja organisasi mendapatkan dasar yang *reasonable* untuk mengambil keputusan-keputusan.

Dalam konteks pemerintah daerah, program yang dimaksud adalah perencanaan strategis daerah, yang kemudian didefinisikan melalui indikator kinerja, indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Kinerja sector pemerintahan bersifat multidimensional, sehingga tidak tepat apabila menetapkan satu indikator tunggal untuk mengukur kinerja secara komprehensif. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja fiskal pemerintah adalah informasi finansial (Mardiasmo, 2018).

Pada pemerintah daerah disebut anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Yang terdiri dari pos pendapatan yaitu PAD, dana perimbangan dan belanja langsung maupun tidak langsung.

Pengukuran kinerja bermanfaat bagi organisasi pemerintahan diantaranya (Mardiasmo, 2018):

- a. Dapat digunakan sebagai ukuran dalam menilai kinerja manajemen;
- b. Dapat memberi arah pada pencapaian target kinerja;
- c. Digunakan dalam memonitor atau mengevaluasi pencapaian kinerja. Dalam kondisi tertentu dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan korektif seperlunya untuk memperbaiki kinerja;
- d. Digunakan sebagai dasar yang objektif untuk pemberian reward and punishment dari sistem pengukuran kinerja organisasi yang telah disepakati sebelumnya;
- e. Dapat menjadi alat komunikasi di antara pimpinan dan bawahan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi;
- f. Mampu membantu mengidentifikasi pemenuhan kepuasan masyarakat;
- g. Mampu membantu memahami operasional kegiatan di instansi pemerintahan;
- h. Untuk memastikan pengambilan keputusan telah dilakukan secara objektif.

Analisis Rasio keuangan daerah dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintahan daerah (Mahmudi, 2016). Rasio keuangan daerah yang bisa digunakan seperti Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Belanja Modal.

1) Rasio Desentralisasi Fiskal (DOF)

Rasio Desentralisasi fiskal menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

$$DOF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan daerah}} \times 100$$

Table 1 Skala Interval Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio Desentralisasi Fiskal (%)	Kemampuan keuangan Pemerintah Daerah
0-10	Sangat kurang
10-20	Kurang
20-30	Cukup
30-40	Sedang
40-50	Baik
>50	Sangat Baik

Sumber: (UGM, 1991)

2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan proporsi jumlah realisasi Pendapatan Transfer pada tahun berjalan terhadap total realisasi Pendapatan Daerah pada tahun berjalan secara keseluruhan (Mahmudi, 2016).

Pendapatan Transfer merupakan bagian Pendapatan Daerah yang diterima dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah. Ada empat jenis transfer pemerintah pusat kepada

daerah yaitu, (1) Dana Perimbangan, (2) Dana Otonomi Khusus, (3) Dana Keistimewaan, dan (4) Dana Desa. Semakin tinggi Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah mengindikasikan semakin tinggi ketergantungan pemerintah daerah pada pendanaan dari pusat (Indramawan, 2018). Formula dan skala interval dari Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan daerah}} \times 100$$

Table 2 Skala Interval Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah

Rasio Ketergantungan (%)	Ketergantungan Keuangan Pemda
0-25	Sangat Rendah
25-50	Rendah
50-75	Sedang
75-100	Tinggi

Sumber: (UGM, 1991)

3) Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD ini menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan seluruh sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan jumlah PAD yang telah ditargetkan. Menurut (Mahsun, 2006), rasio ini diukur melalui perbandingan:

$$RE\ PAD = \frac{\text{Total Realisasi (PAD)}}{\text{Total Anggaran PAD}} \times 100$$

Table 3 Skala Interval Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektif ID (%)	Kategori
<75	Tidak Efektif
75-89	Kurang Efektif
90-99	Cukup Efektif
100	Efektif
>100	Sangat Efektif

Sumber: (UGM, 1991)

4) Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal dihitung dari perbandingan total Belanja Modal tahun berjalan dengan Belanja Daerah pada tahun berjalan secara keseluruhan (Mahmudi, 2016). Belanja Modal merupakan bagian dari Belanja Daerah yang dikeluarkan untuk perolehan (pengadaan) aset tetap atau aset lainnya yang dapat digunakan atau memberi manfaat melebihi jangka waktu satu tahun anggaran.

Menurut (Muda & Naibaho, 2018) terdapat dua jenis Belanja Modal, yaitu belanja modal yang pengadaannya dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti untuk pembangunan jalan, rumah sakit, sekolah, dan seterusnya. Kedua, belanja modal yang pengadaannya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat, yaitu belanja modal untuk menunjang operasional aparatur daerah atau negara, seperti untuk pembangunan gedung pemerintahan, kendaraan dinas operasional, dan seterusnya.

Dalam rasio Belanja Modal tidak dikenal skala interval untuk mengukur baik dan buruknya alokasi. Namun menurut (Mahmudi, 2016), rata-rata Belanja Modal di pemerintahan daerah di kisaran 5% – 20% dari total Belanja Daerah. Formula dari Rasio Belanja Modal sebagai berikut:

$$RBM = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}} \times 100$$

Transfer Pemerintah

Alokasi anggaran pemerintah pusat terhadap daerah disebut pemindahan (transfer), transefer merupakan salah satu sumber pendanaan pemerintah daerah yang memiliki kontribusi besar pada beberapa daerah dalam pengelolaan daerahnya pada saat ini. Adapun alokasi oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memiliki tujuan yang berbeda yang mempengaruhi bentuk dan Inklusivitasnya, (Davey, 1982) yaitu:

- a) Pembelanjaan, seluruhnya atau sebagian, biaya pelayanan atau program pembangunan yang kepentingannya bersifat nasional.
- b) Mendorong upaya oleh pemerintahan regional untuk program-program pembangunan dan pelayanan yang sejalan dengan kebijakan nasional.
- c) Merangsang pertumbuhan regional, baik untuk membantu pertumbuhan maupun mengurangi ketimpangan antar wilayah
- d) Mengendalikan pengeluaran regional untuk memastikan penyesuaian terhadap standard an kebijaksanaan nasional.
- e) Memantapkan standar pelayanan pembangunan yang adil atau lebih adil.
- f) Mengembangkan wilayah-wilayah yang kapasitas fiskalnya rendah suatu potensi yang relative rendah untuk meningkatkan penerimaan langsung mereka.
- g) Membantu wilayah-wilayah untuk mengatasi keadaan darurat.

Lebih lanjut Broadway & Wildasin (Elia, 1997) menyebutkan bahwa bantuan (*grant*) dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah merupakan fakta didalam pemerintahan dengan sistem multi tingkat. Pemberian bantuan mempunyai beberapa tujuan antara lain mengatasi masalah eksternalitas atau *spillover* antar daerah, mengatasi perbedaan dalam kemampuan menarik pajak atau ketidakseimbangan fiskal, mencapai redistribusi pendapatan yang lebih merata antar daerah dan mengatasi inefisiensi sebagai akibat mobilitas tenaga kerja antar daerah.

Secara umum, bantuan (*grant*) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat dibedakan menjadi dua (Elia, 1997) Pertama, bantuan umum atau blok (*general grant/block grant/unconditional grant*), yaitu bantuan kepada pemerintah daerah yang tidak disertai dengan ikatan atau syarat tertentu dapat dimaknai penggunaan / alokasinya berdasarkan ketentuan daerah yang bersangkutan. Kedua, bantuan khusus (*specific grant/conditional grant*), yaitu bantuan yang diberikan kepada daerah untuk menyediakan pelayanan atau jasa public yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Lebih lanjut, (Musgrave & Musgrave, 1989) mengelompokkan jenis bantuan menjadi *matching grant dan non matching grant*. Bantuan tak bersyarat (*non matching grant*) merupakan jenis bantuan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dialokasikan pada kebutuhan daerah tersebut. Bantuan bersyarat (*matching grant*) adalah bantuan yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat kepada daerah, misalnya untuk memperbaiki proyek-proyek yang diberikan pemerintah pusat atau daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan transfer pemerintah atau dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuannya adalah mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Adapun dana perimbangan terdiri dari: 1) Dana bagi hasil; 2) Dana Alokasi umum; dan 3) Dana Alokasi Khusus.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah sebagai sebuah penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Pasal 31 PP No. 12 Tahun 2019 ayat 1 menyatakan bahwa PAD bersumber dari:

- a) Pajak Daerah, Meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- b) Retribusi Daerah, Meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- d) Lain-lain pendapatan asli daerah sah.

Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

1. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan.
2. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan.
3. hasil kerja sama daerah.
4. jasa giro.
5. hasil pengelolaan dana bergulir.
6. pendapatan bunga.
7. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah.
8. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah.
9. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
10. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
11. pendapatan denda pajak daerah.
12. pendapatan denda retribusi daerah
13. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
14. pendapatan dari pengembalian
15. pendapatan dari BLUD.
16. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Daerah

Pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah, dalam PP no 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengeluaran daerah atau yang disebut belanja daerah bertujuan untuk menandai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun klasifikasi belanja daerah terdiri atas 1)belanja operasi; 2)belanja modal; 3)belanja tidak terduga; dan 4)belanja transfer

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang tujuannya adalah untuk membuat deskripsi,

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan kinerja keuangan serta kemampuan keuangan pemerintah daerah Sulawesi Tenggara yang diukur melalui perhitungan rasio keuangan berdasarkan laporan realisasi APBD tahun anggaran 2018 dan disajikan dalam bentuk tulisan secara sistematis, Fokus dalam penelitian ini adalah Kemampuan dan kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2018.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data statistik keuangan daerah kabupaten-kota di Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2018 yang diakses dari laman resmi badan Pusat Statistik. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Dalam analisis ini akan digambarkan hal-hal yang berkaitan untuk mengetahui kemampuan keuangan serta kinerja keuangan daerah kabupaten-kota di Sulawesi Tenggara kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan analisis data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2012) analisis data kualitatif terdiri dari tiga aktivitas yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Badan Pusat statistik Provinsi Sulawesi Tenggara. Data yang diambil adalah data seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara (15 kabupaten dan 2 kota). Tahun penelitian dibatasi antara tahun 2015 sampai dengan 2018. Dilihat dari bentuknya maka data yang digunakan adalah data kombinasi dari data antar ruang (*cross section*) dan runtun waktu (*time series*) yang disebut juga data pooling (*pooled data*).

Alat Analisis

Perhitungan terhadap data keuangan pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan rumus yang telah disajikan sebelumnya. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap masing-masing rasio keuangan yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Subjek Penelitian

Sulawesi Tenggara Merupakan provinsi yang terletak di bagian tenggara pulau Sulawesi, secara geografis terletak dibagian selatan khatulistiwa yang mempunyai luas wilayah daratan 38.140 km² (38.140.000 ha) dan perairan (laut) seluas 110.000 km² (11.000.000 ha).

Adapun jumlah kabupaten-kotanya sebanyak 15 Kabupaten dan 2 Kota. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten-Kota Tahun 2018 untuk menggambarkan besar pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut

Table 4 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten-Kota di Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2018

(dalam Miliar Rupiah)

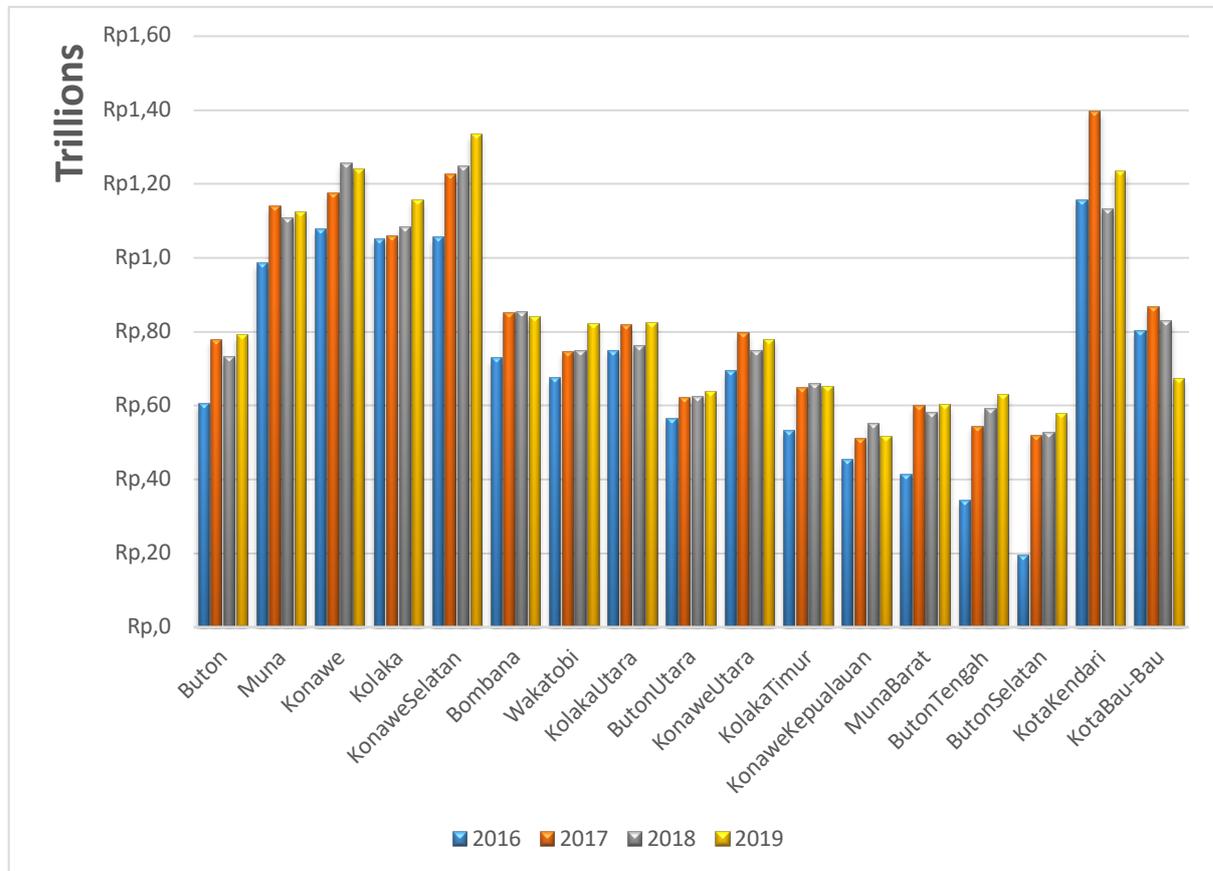
No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Terbesar	No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Terbesar
1	Buton	789,282,626	9	10	Konawe Utara	778,087,318	10
2	Muna	1,123,587,43	5	11	Kolaka Timur	651,289,077	12
3	Konawe	1,239,526,90	3	12	Konawe Kepul	514,547,647	17
4	Kolaka	1,155,131,42	4	13	Muna Barat	601,856,282	15
5	Konawe Selata	1,333,141,90	1	14	Buton Tengah	628,191,921	13
5	Bombana	838,855,722	6	15	Buton Selatan	576,632,206	16
7	Wakatobi	819,176,075	8	16	Kota Kendari	1,232,806,86	2
8	Kolaka Utara	824,185,304	7	17	Kota Bau-Bau	671,848,394	11

9 | Buton Utara 635,022,454 14

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id data update 20 Desember 2020 (diolah)

Dapat dilihat pada tabel 4 bahwa kabupaten-kota dengan realisasi pendapatan Daerah terbesar (5 besar) pada tahun 2018 yaitu: (1) Kabupaten Konawe Selatan; (2) Kota Kendari; (3) Kabupaten Konawe; (4) Kabupaten Kolaka; (5) Kabupaten Konawe. Bila disajikan dalam bentuk grafik realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten - Kota di Sulawesi Tenggara tahun 2015-2018 sebagai berikut:

Gambar 1 Realisasi Pendapatan Kabupaten-Kota di Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2015-2018



Analisis Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio ini menggambarkan besar kemampuan daerah dalam membiayai Pengeluaran (Belanja) Daerah dari hasil

pemungutan PAD. Berikut disajikan Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten-Kota di Sulawesi Tenggara tahun 2015-2018:

Table 5 Rasio Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten-Kota di Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2015-2018

(rasio dalam %)

No	Kabupaten/Kota	2015		2016		2017		2018	
		Rasio	Prkt	Rasio	Prkt	Rasio	Prkt	Rasio	Prkt
1	Buton	4,10%	8	5,04%	4	6,60%	8	3,50%	14
2	Muna	3,35%	10	3,73%	8	7,28%	6	4,17%	12
3	Konawe	5,21%	5	4,91%	6	7,77%	5	6,19%	5
4	Kolaka	6,31%	3	6,82%	3	11,30%	3	8,76%	3

5	Konawe Selatan	4,15%	7	3,92%	7	8,24%	4	4,60%	10
6	Bombana	4,75%	6	3,68%	9	6,39%	9	7,81%	4
7	Wakatobi	3,66%	9	3,36%	10	6,23%	10	4,10%	13
8	Kolaka Utara	5,42%	4	4,92%	5	7,28%	6	5,59%	7
9	Buton Utara	2,70%	11	2,07%	13	4,19%	14	2,40%	16
10	Konawe Utara	1,35%	15	1,46%	16	3,35%	15	2,01%	17
11	Kolaka Timur	2,31%	12	2,39%	11	5,22%	11	5,96%	6
12	Konawe Kepulauan	1,53%	14	1,90%	14	2,15%	16	2,93%	15
13	Muna Barat	1,30%	16	2,70%	12	6,70%	7	5,48%	8
14	Buton Tengah	1,81%	13	0,83%	17	5,20%	13	5,00%	9
15	Buton Selatan	0,97%	17	1,48%	15	1,62%	12	4,49%	11
16	Kota Kendari	14,76%	1	12,84%	1	19,29%	1	14,29%	1
17	Kota Bau-Bau	7,17%	2	8,00%	2	12,85%	2	9,44%	2

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id data update 20 Desember 2020 (diolah)

Tabel 5 diatas secara umum menunjukkan bahwa mayoritas kabupaten kota di Sulawesi Tenggara masih tergolong rendah desentralisasi fiskalnya, selama periode 2014-2018 posisi tertinggi diraih oleh Kota kendari dengan rasio maksimal di tahun 2017 sebesar 19,29%. Selama periode tersebut juga kota bau-bau dan kabupaten kolaka konsisten di peringkat ke dua dan ketiga, selanjutnya diposisi ke empat dan seterusnya cenderung fluktuatif. Berikut ini disajikan pengelompokan kemampuan keuangan pemerintah kabupaten-kota di Sulawesi Tenggara berdasarkan skal interval Rasio Desentralisasi Fiskal pada tahun 2018:

Table 6 Pengelompokan Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten-Kota di Sulawesi Tenggara Berdasarkan Skala Interval Rasio Desentralisasi Fiskal Tahun Anggaran 2018

Rasio skal (%)	Desentral merintah Daerah	Kemampuan keua Kabupaten/Kota
0-10	Sangat kurang	Seluruh Kabupaten-Kota di Sulawesi Tenggara kecuali Kota Kendari)
10-20	Kurang	Kota Kendari
20-30	Cukup	-
30-40	Sedang	-
40-50	Baik	-
>50	Sangat Baik	-

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id data update 20 Desember 2020 (diolah)

Dari tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa secara umum tingkat kemampuan keuangan daerah pemerintah kabupaten-kota di Sulawesi Tenggara masih sangat kurang, adapun kota kendari masuk pada kategori kurang dengan nilai 14,29%.

Bila ditelusuri komponen PAD yang menyumbang porsi terbesar pada realisasi PAD Pemerintah Kota Kendari tahun 2018 (176,17 miliar), yaitu berasal dari hasil pemungutan pajak daerah (sebesar 103,21 miliar atau 96% dari PAD).

Analisis Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah

Rasio ini menggambarkan besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber penerimaan dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah dalam membiayai pengeluaran (belanja) daerah. Berikut disajikan Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Kabupaten-Kota di Sulawesi Tenggara:

Table 7 Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Kabupaten-Kota di Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2015-2108

(rasio dalam %)

No	Kabupaten/Kot:	2015		2016		2017		2018	
		Rasio	Prkt	Rasio	Prkt	Rasio	Prkt	Rasio	Prkt
1	Buton	67,33%	2	80,88%	6	75,10%	7	79,10%	7
2	Muna	73,36%	3	87,35%	13	81,79%	13	81,54%	10
3	Konawe	74,70%	4	79,94%	5	68,11%	1	71,46%	2
4	Kolaka	81,77%	11	82,37%	8	74,98%	6	74,14%	4
5	Konawe Selatan	76,91%	5	71,82%	1	68,51%	2	71,96%	3
6	Bombana	78,62%	6	80,92%	7	72,59%	3	68,50%	1
7	Wakatobi	81,71%	10	87,95%	15	80,82%	11	83,57%	13
8	Kolaka Utara	80,39%	7	83,02%	9	76,59%	8	74,82%	5
9	Buton Utara	84,53%	13	88,18%	16	84,33%	15	84,73%	16
10	Konawe Utara	86,11%	14	84,80%	10	78,72%	9	80,58%	9
11	Kolaka Timur	87,71%	15	79,27%	4	79,56%	10	79,24%	8
12	Konawe Kepulauan	90,70%	17	87,73%	14	73,03%	4	81,92%	12
13	Muna Barat	82,52%	12	87,23%	12	80,85%	12	81,86%	11
14	Buton Tengah	88,48%	16	88,84%	17	84,38%	16	84,68%	15
15	Buton Selatan	81,50%	9	85,79%	11	79,56%	10	84,09%	14
16	Kota Kendari	66,57%	1	75,86%	2	74,67%	5	76,51%	6
17	Kota Bau-Bau	81,44%	8	78,26%	3	83,43%	14	85,47%	17

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id data update 20 Desember 2020 (diolah)

Dilihat pada tabel 7 diatas menunjukkan posisi ketergantungan keuangan pemerintah daerah terendah mengalami perubahan selama kurun waktu 2015-2018 kecendrungan yang fluktuatif ini juga terjadi pada daerah dengan rasio ketergantungan yang tinggi, adapun selama periode hitung terdapat beberapa kabupaten yang mengalami penurunan rasio ketergantungan secara konsisten yaitu kabupaten Kolaka, Konawe Utara, dan Muna barat (3 tahun konsisten di posisi 12). Berikut ini disajikan pengelompokan Ketergantungan Keuangan Pemerintah Kabupaten-Kota di Sulawesi Tenggara berdasarkan skala interval rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah daerah pada tahun 2018:

Table 8 Pengelompokan Ketergantungan Keuangan Pemerintah Kabupaten-Kota di Sulawesi Tenggara Berdasarkan Skala Interval Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018

Rasio Ketergantungan (Pemerintah Daerah)	Ketergantungan keua	Kabupaten/Kota
0-25	Sangat Rendah	-
25-50	Rendah	-
50-75	Sedang	(1)Kab.Konawe, (2)Kab.Kolaka, (3)Kab.Ko Kab.Bombana, (5)Kolut,
75-100	Tinggi	(1)Kab.Buton, (2)Kab.Muna, (3)Kab.Wake Kab.Konkep, (5)Kab.Mubar, (6)Kab.Bu Kab.Busel, (8)Kota Kendari, (9)Kota Bau-Bau

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id data update 20 Desember 2020 (diolah)

Tabel 8 diatas menunjukkan belum ada daerah yang ketergantungan keuangannya masuk dalam kategori “RENDAH”. Hal ini menunjukkan bahwa komponen dana perimbangan dari pemerintah pusat

utamanya DAU) masih lebih tinggi dibandingkan PAD mayoritas kabupaten-kota di Sulawesi Tenggara.

Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (halim, 2002). Berikut Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten-Kota di Sulawesi Tenggara:

Table 9 Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Kota di Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2015-2018

(rasio dalam %)

No	Kabupaten/Ko	2015		2016		2017		2018	
		Rasio	Prkt	Rasio	Prkt	Rasio	Prkt	Rasio	Prkt
1	Buton	152,45%	4	228,45%	2	290,30%	3	59,79%	15
2	Muna	77,18%	14	89,91%	14	136,78%	15	46,75%	16
3	Konawe	79,37%	13	96,63%	11	76,40%	16	67,84%	13
4	Kolaka	118,76%	7	99,65%	9	152,71%	11	120,93%	3
5	Konawe Selatar	107,66%	10	103,66%	7	195,69%	7	88,98%	10
6	Bombana	89,94%	11	84,50%	15	143,84%	13	80,67%	11
7	Wakatobi	89,84%	12	95,03%	12	167,43%	10	111,35%	6
8	Kolaka Utara	115,55%	9	93,70%	13	139,64%	14	113,74%	5
9	Buton Utara	129,80%	5	99,59%	10	200,98%	4	59,86%	14
10	Konawe Utara	50,04%	16	115,76%	6	196,10%	6	97,00%	9
11	Kolaka Timur	122,27%	6	103,53%	8	198,69%	5	104,53%	7
12	Konawe Kepula	181,87%	3	190,15%	3	146,32%	12	155,38%	2
13	Muna Barat	523,98%	2	503,88%	1	574,10%	1	100,47%	8
14	Buton Tengah	1164,65%	1	83,89%	16	371,79%	2	117,98%	4
15	Buton Selatan	40,47%	17	183,03%	4	188,57%	8	387,52%	1
16	Kota Kendari	56,80%	15	65,98%	17	61,14%	17	26,08%	17
17	Kota Bau-Bau	116,57%	8	140,31%	5	175,43%	9	74,24%	12

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id data update 20 Desember 2020 (diolah)

Tabel 9 diatas menunjukkan posisi pemerintah buton selatan sebagai daerah dengan Rasio Efektivitas PAD tertinggi, dimana targetnya senilai 6,6 miliar sedangkan realisasinya sebesar 25 miliar dan Kota Kendari sebagai daerah dengan RE PAD terendah di tahun 2018 dengan selisih kurang antara anggaran dan realisasinya sebesar 499 miliar atau 74% dari total pagu anggaran.

Selain itu dari data diatas terlihat bahwa kabupaten Buton Selatan adalah daerah yang secara konsisten selama periode hitung meningkat rasio efektivitas PAD nya, berawal di angka 40% ditahun 2015, 183% ditahun 2016, 188% ditahun 2017, dan secara signifikan naik di tahun 2018 ke angka 387%.

Berikut disajikan pengelompokkan Efektivitas Pemungutan PAD Pemerintah Kabupaten-Kota di Sulawesi Tenggara berdasarkan Skala Interval Rasio Efektivitas PAD pada tahun 2018:

Table 10 Pengelompokan Efektivitas Pemungutan PAD Pemerintah Kabupaten-Kota di Sulawesi Tenggara Berdasarkan Skala Interval Rasio Efektivitas PAD Tahun 2018

Rasio Efektivitas PAD (Kategori	Kabupaten/Kota
<75	Tidak Efektif	(1)Kota Kendari, (2)Kab.Muna, (3)Kab.B Kab.Butur, (5)Kab.Konawe, (6)Kota Bau-Bau
75-89	Kurang Efektif	(1)Kab.Bombana, (2)Kab.Konsel
90-99	Cukup Efektif	(1)Kab.Konut
100	Efektif	(1)Kab.Mubar
>100	Sangat Efektif	(1)Kab.Busel, (2)Kab.Konkep, (3)Kab.Ko Kab.Buteng, (5)Kab.Kolut, (6)Kab.Wake Kab.Koltim

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id data update 20 Desember 2020 (diolah) Tabel 10 diatas menunjukkan bahwa terdapat gap kecil antara porsi efektif dan tidak efektif Kabupaten-Kota di Sulawesi Tenggara dalam merealisasikan target PAD dimana kelompok efektif berjumlah 8 kabupaten dan tidak efektif berjumlah 9 Kabupaten-Kota temuan lainnya bahwa 2 Kota di Sulawesi Tenggara justru berada pada kelompok tidak efektif yaitu Kota Kendari dan Kota Bau-Bau.

Jumlah realisasi lebih bila di akumulasikan dari kelompok efektif (8 Kabupaten) sebagaimana disebutkan pada tabel diatas mencapai Rp57,7 miliar, dengan Kabupaten Buton Selatan menyumbang realisasi lebih terbesar sebesar Rp19 miliar dari pagu anggaran awal, adapun Kabupaten Kolaka sebagai leading pada kelompok efektif dengan realisasi Rp101 miliar.

Sedangkan bila diakumulasikan dari kelompok tidak efektif (9 Kabupaten-Kota) realisasi kurang mencapai Rp663 miliar.

Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio ini menggambarkan perbandingan besar pengeluaran pemerintah daerah untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode tahun anggaran dengan total Belanja Daerah secara keseluruhan. Melalui pengeluaran pemerintah daerah berupa Belanja Modal diharapkan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Berikut disajikan Rasio Belanja Modal Pemerintah Kabupaten-Kota di

Sulawesi Tenggara 2015-2018:

Table 11 Rasio Belanja Modal Pemerintah Kabupaten-Kota di Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2015-2018

(rasio dalam %)

No	Kabupaten/Kot:	2015		2016		2017		2018	
		Rasio	Prkt	Rasio	Prkt	Rasio	Prkt	Rasio	Prkt
1	Buton	37,10%	4	33,65%	8	25,78%	10	31,39%	5
2	Muna	29,19%	13	33,24%	10	25,44%	11	21,49%	13
3	Konawe	19,50%	16	22,80%	16	21,30%	15	16,77%	16
4	Kolaka	28,06%	14	28,94%	15	23,67%	13	22,72%	12
5	Konawe Selatan	25,24%	15	19,54%	17	18,29%	16	26,65%	9
6	Bombana	32,41%	9	34,14%	7	25,40%	12	19,82%	14
7	Wakatobi	31,70%	10	30,50%	13	27,53%	8	29,90%	6
8	Kolaka Utara	35,82%	6	32,27%	11	17,91%	17	15,27%	17
9	Buton Utara	40,94%	2	35,93%	4	29,94%	7	26,63%	10
10	Konawe Utara	32,68%	8	29,95%	14	21,99%	14	19,03%	15
11	Kolaka Timur	34,20%	7	34,36%	6	33,36%	5	29,66%	7

12	Konawe Kepulauan	52,88%	1	55,67%	1	47,61%	1	38,65%	1
13	Muna Barat	37,53%	3	42,82%	2	42,28%	2	34,59%	3
14	Buton Tengah	35,85%	5	42,60%	3	37,37%	3	35,94%	2
15	Buton Selatan	19,23%	17	31,22%	12	34,12%	4	28,86%	8
16	Kota Kendari	30,43%	12	34,77%	5	27,17%	9	31,76%	4
17	Kota Bau-Bau	31,66%	11	33,25%	9	30,77%	6	26,57%	11

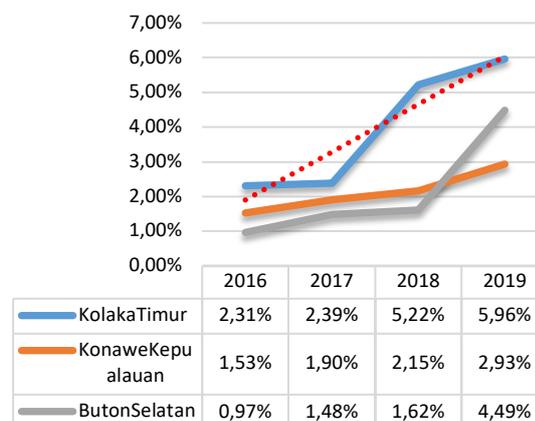
Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id data update 20 Desember 2020 (diolah)

Tabel 11 diatas menunjukkan mayoritas Kabupaten-Kota di Sulawesi Tenggara memiliki rasio belanja modal diatas rata-rata belanja modal di pemerintah daerah, sebagaimana disampaikan (Mahmudi, 2016) bahwa jumlah rata-rata belanja modal seharusnya Pemerintah Daerah berada di kisaran 5%-20% dari total belanja daerah.

Adapun setiap tahunnya (periode hitung) Kabupaten Konawe Kepulauan selalu berada di urutan pertama dengan rasio tertinggi, sedangkan yang konsisten menurun rasionya adalah Kabupaten Kolaka Utara, Buton Utara, Konawe Utara.

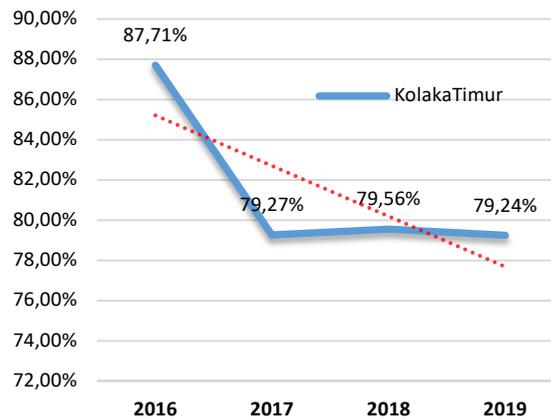
Bila disajikan berdasarkan data *time series* (periode 2015-2018) Pemerintah Daerah Kabupaten-Kota di Sulawesi Tenggara yang secara konsisten mengalami perubahan lebih baik pada setiap aspek kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur menggunakan rasio keuangan daerah, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Gambar 2 Rasio Desentralisasi Fiskal Terbaik Pemerintah Kabupaten-Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2018



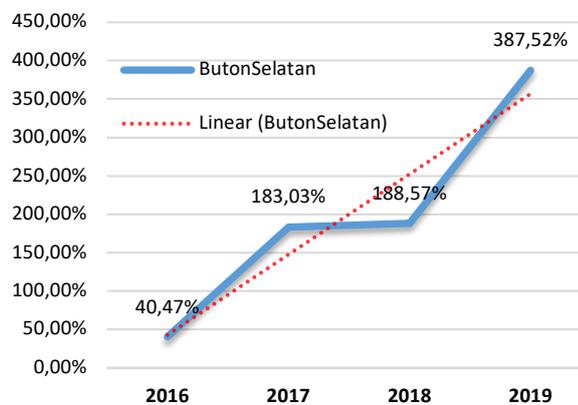
Kolaka Timur, Konawe Kepulauan dan Buton Selatan merupakan kabupaten yang paling konsisten meningkatkan PADnya.

Gambar 3 Rasio Ketrngantungan Keuangan Pemerintah Daerah Terbaik Pemerintah Kabupaten-Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2018



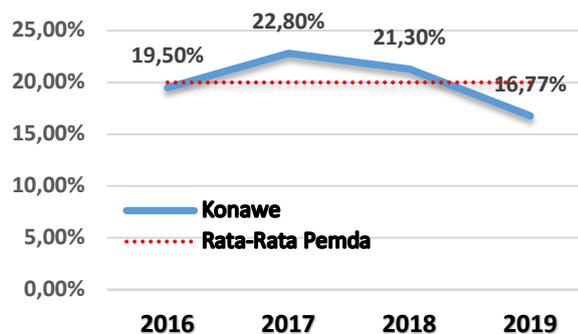
Kabupaten Kolaka Timur menjadi yang paling konsisten dalam mengurangi ketergantungannya pada dana transfer pemerintah dalam proporsi anggaran pendapatannya.

Gambar 4 Rasio Ketrngantungan Keuangan Pemerintah Daerah Terbaik Pemerintah Kabupaten-Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2018



Buton Selatan menjadi Kabupaten yang paling konsisten dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerahnya sesuai anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Gambar 5 Rasio Belanja Modal Terbaik Pemerintah Kabupaten-Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2018



Kabupaten Konawe menjadi daerah yang paling mampu menjaga rasio belanja modalnya di kisaran angka 20% dibandingkan pemerintah Kabupaten-Kota di Sulawesi Tenggara yang lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini berupaya mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten-Kota di Sulawesi Tenggara dengan menggunakan alat ukur Rasio Keuangan Daerah, yang terdiri dari Rasio Desentralisasi Fiskal (Dof), Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Belanja Modal.. dari hasil dan pembahasan pada bagian sebelumnya disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengukuran Rasio Desentralisasi Fiskal disimpulkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara tergolong “Sangat Kurang” . dimana secara keseluruhan rasio deentralisasi fiskal berada pada angka di bawah 20%. Adapun komponen PAD yang menjadi contributor paling besar pada realisasi PAD adalah bersumber dari pajak daerah. Selain itu kabupaten yang tergolong paling baik karena selama periode 2015-2018 konsisten meningkatkan rasionya adalah kabupaten Kolaka Timur, Konawe Kepulauan dan Buton Selatan.

2. Berdasarkan hasil pengukuran Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah disimpulkan bahwa mayoritas berada pada kategori “Tinggi”, menunjukkan bahwa daerah dalam hal ini Kabupaten/Kota belum mandiri, adapun pemerintah kabupaten koltim secara konisten mampu menurunkan rasio ketergantungannya walaupun terdapat sedikit gap di 2017.

3. Berdasarkan hasil pengukuran Rasio Efktivitas PAD disimpulkan bahwa terdapt distribusi seimbang antara kelompok daerah yang efektif dan tidak efektif, dimana paling efektif terdapat pada Kabupaten Buton Selatan sedangkan yang tidak efektif Kota Kendari.

4. Berdasarkan hasil pengukuran Rasio Belanja Modal, pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara secara keseluruhn memeiliki rasio Belanja Modal diatas rata-rata peemrintah daerah yakni 20%. Daerah kabupaten Konawe menjadi daerah yang paling berhasil mengelola belanja modalnya di kisaran angka 20%.

Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan pada kedalamn pengujian, dan pengkajiannya. Penelitin yang selanjutnya dapat menambahkan beberapa ruang lingkup pengujian untuk menghasilkan data yang lebih komprehensif. Bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara, Agar menjadikan pengukuran Rasio sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan desentralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswarodi. (2001). *Analisis Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 di Kabupaten Lampung Selatan, Bunga Rampai Manajemn Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Davey, K. (1982). *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*. Jakarta: UI-Press.
- Digdowiseiso, K. (2016). Governance, Fiscal Decentralization, And Growth In Indonesia. *Populis*, 1-18.
- Elia, R. (1997). Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II Suatu Studi di Maluku. *Prisma*, 39-50.

- Fadli, & Faisal. (2014). Analysis of Direct and Indirect Effect of Fiscal:Case Study Provinces in east and west Indonesia year 2006-1012. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 45-55.
- Halim, a. (2002). *Akuntansi ektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 53-64.
- Indramawan, D. (2018). Impact of Financial Performance of Local Government on Human Development Index in Papua. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1247-1272
- Karamoy, H., & Tulung, J. E. (2020). The Effect of Banking Risk on Indonesian Regional Development Bank. *Banks and Bank Systems*, 15(2), 130-137
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru)*. ANDI.
- Mojambo, G. A., Tulung, J. E., & Saerang, R. T. (2020). The Influence of Top Management Team (TMT) Characteristics Toward Indonesian Banks Financial Performance During the Digital Era (2014-2018). *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 7(1).
- Muda, I., & Naibaho, R. (2018). Variables Influencing Allocation of Capital Expenditure in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 126, 1315-1755.
- Musgrave, R., & Musgrave, P. (1989). *Public Finance In Theory and Practice, Fifth Edition*. USA: Mc Graw Hill.
- Oentarto, S. M. (2004). Perumusan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah. *Seminar Nasional Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UAD Press.
- Olivia, G. (2018). *Menkeu: Ketergantungan APBD pada Dana Transfer Daerah Sangat Tinggi*. Retrieved from Kontan.Co.Id.: <https://nasional.kontan.co.id/news/menkeu-ketergantungan-apbd-pada-dana-transfer-daerah-sangat-tinggi>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- UGM, F. (1991). *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab*. Laporan Akhir Penelitian.